

EKOWISATA BERBASIS KELEMBAGAAN: STRATEGI PENCAPAIAN SDGS 16 “PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH” DI KAWASAN MANGROVE MENTAWIR, KECAMATAN SEPAKU

Cherlys^{1}, Ebzalika Fatiha¹, Nabilla Anisa Hidayati¹, Irfan Nurdiansyah¹, Sajiwoaji Priyonggo Andono¹, Razieq Hasan¹, Farisa Khoirunnisa¹, Sania Nurul Lathifah¹, Ridhwan Adnan Saputro¹, Vitta Annisa Faradilla¹, Azzahra Lintang Maharani¹, Desy Rahma Febrianty¹, Alexander Minifos¹, Dewi Sri Sulistyorini¹, Sekar Kaniraras¹, Chandra Rizky Arifianto¹, Raden Roro Marsyanda Mahira¹, Laila Putri Rachmayani¹, Isnaeni Pangestu Utami¹, Chanaya Pradipta Berlin¹*

¹Mahasiswa Sarjana Program Studi Pembangunan Wilayah, Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Email Corresponding Author: cecycherlys@gmail.com

ABSTRAK

Ekowisata berbasis masyarakat di kawasan Mangrove Mentawir, Kecamatan Sepaku, memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kelembagaan lokal dalam tata kelola ekowisata serta mengidentifikasi praktik yang selaras dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deduktif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus pada pemetaan *stakeholder*, termasuk identifikasi, profil, model peran, serta hubungan antar-aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis Tiram Tambun berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan ekowisata, namun keberlanjutan aktivitasnya sangat bergantung pada tokoh sentral dan dukungan kelembagaan eksternal. *Stakeholder* sekunder seperti PT Inhutani, Kelurahan Mentawir, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara turut memberikan kontribusi, meski masih bersifat parsial dan belum terlembagakan secara kuat. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya forum multipihak, peningkatan kapasitas masyarakat, dan partisipasi inklusif dalam memperkuat tata kelola ekowisata. Dengan demikian, penguatan kelembagaan di Mentawir tidak hanya relevan bagi keberlanjutan destinasi lokal, tetapi juga signifikan dalam mendukung pembangunan kawasan penyangga IKN yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekowisata Berbasis Masyarakat; Kelembagaan Lokal; *Stakeholder*; SDGs 16; Pembangunan Berkelanjutan; Ibu Kota Negara (IKN)

ABSTRACT

Community-based ecotourism in the Mangrove Mentawir area, Sepaku District, holds a strategic position in supporting sustainable development, particularly as a buffer zone for the new capital city (IKN). This study aims to analyze the role of local institutions in ecotourism governance and to identify practices aligned with the principles of Sustainable Development Goal (SDG) 16, namely peace, justice, and strong institutions. The research applied a deductive qualitative approach, employing in-depth interviews, observations, and document reviews as data collection techniques. Data were analyzed using qualitative descriptive methods with a focus on stakeholder mapping, including identification, profiling, role modeling, and inter-actor relationships. The findings indicate that Pokdarwis Tiram Tambun serves as the primary actor in ecotourism management; however, the sustainability of its activities remains highly dependent on central figures and external institutional support. Secondary stakeholders such as PT Inhutani, Mentawir Village Administration, and the Penajam Paser Utara Tourism Office contribute to the process, though their roles remain partial and not yet firmly institutionalized. These findings highlight the importance of multi-stakeholder forums, community capacity building, and inclusive participation to strengthen ecotourism governance. Strengthening local institutions in Mentawir is therefore not only relevant for the sustainability of the local destination but also significant in supporting the development of a resilient, just, and sustainable IKN buffer zone.

Keywords: *Community-based ecotourism; local institutions; stakeholders; SDGs 16; sustainable development; new capital city (IKN)*

History Article

Submitted 10 October 2025 | Revised 15 October 2025 | Accepted 11 November 2025

License and Copyright

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
International CC BY-NC-SA 4.0

4.0



Website

<https://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/JUPARITA/index>

Email

juparita@bukitpengharapan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) memiliki urgensi sebagai komitmen global yang diwujudkan melalui serangkaian aksi guna menciptakan kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Implementasi SDGs di Indonesia turut dilakukan pada tingkat lokal diselaraskan dengan target pembangunan yang ingin dicapai. Tujuan SDGs ke-16 berperan untuk menciptakan inklusivitas dan perdamaian (Peace), mewujudkan penegakan keadilan (Justice), dan membangun institusi tangguh (Strong Institutions) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (Witarti et al., 2020). Salah satu komponen tujuan tersebut yakni membangun institusi tangguh yang dapat diimplementasikan pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Adapun mekanisme kinerja kelembagaan perlu dioptimalkan supaya ekowisata mampu dikelola sesuai prinsip keberlanjutan (Aini et al., 2021).

Kawasan Mangrove Mentawir di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan kawasan lindung seluas ± 3.200 hektar, dengan 1.350 hektar untuk konservasi (Suharyono et al. 2023). Ekosistem ini memiliki sedikitnya 17 jenis mangrove, termasuk mangrove pucuk kuning yang langka, serta menjadi habitat fauna penting seperti pesut, penyu, dan bekantan (Kristiningrum et al. 2020). Potensi ekowisata mencakup susur sungai, tracking mangrove, hutan bambu, dan jembatan titian 900 meter (Suharyono et al. 2023). Masyarakat mengelola kawasan ini melalui Pokdarwis Tiram Tambun, yang mengembangkan fasilitas wisata, homestay, dan produk olahan mangrove. Namun, pandemi COVID-19 dan pembangunan IKN mengurangi kunjungan dan perhatian terhadap ekowisata. Tantangan lain meliputi aksesibilitas rendah, minimnya fasilitas, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Meski demikian, dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola, Mangrove Mentawir berpotensi menjadi destinasi ekowisata unggulan di Kalimantan Timur.

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, lemahnya koordinasi kelembagaan, di mana sinergi antara Pokdarwis, PT Inhutani, Dinas Pariwisata, dan Kelurahan Mentawir belum berjalan optimal. Kerja sama antar pihak belum memiliki mekanisme formal yang kuat, sehingga pengelolaan cenderung parsial dan kurang terintegrasi. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat pasca-pandemi dan penetapan IKN menyebabkan menurunnya motivasi warga untuk terlibat dalam pengelolaan, pemeliharaan fasilitas, dan promosi destinasi. Ketiga, terdapat potensi konflik kepentingan antara upaya konservasi, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan rencana pembangunan skala besar seperti IKN. Tanpa mekanisme koordinasi dan mediasi yang efektif, ketiga tantangan ini berisiko menghambat keberlanjutan pengelolaan ekowisata di kawasan Mangrove Mentawir.

Berdasarkan Keppres 32 Tahun 1990, Kawasan Hutan Mangrove Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi strategis karena berada di wilayah penyangga hutan mangrove yang berfungsi sebagai kawasan lindung (Suharyono et al. 2023). Pembangunan IKN membawa potensi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, namun juga menimbulkan risiko tekanan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, khususnya ekosistem pesisir yang rentan (Suharyono et al. 2023). Mangrove Mentawir tidak hanya menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan fungsi ekologis penting, tetapi juga menjadi sumber penghidupan serta identitas budaya masyarakat setempat (Daryono et al. 2023).

Pemilihan Mentawir sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, kawasan ini merepresentasikan praktik ekowisata yang berpotensi menjadi strategi efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah percepatan pembangunan. Kedua, lokasinya yang strategis di wilayah penyangga hutan mangrove khususnya IKN menuntut penguatan kelembagaan lokal untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara adaptif, sejalan dengan prinsip SDGs 16 terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan ekowisata Kawasan Mangrove Mentawir serta mengidentifikasi praktik tata kelola yang sejalan dengan prinsip SDGs 16, mencakup perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan kajian tata kelola kelembagaan dan ekowisata berkelanjutan, memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan kelembagaan dan partisipasi lokal, serta mendorong integrasi prinsip SDGs 16 dalam perencanaan pembangunan kawasan penyangga IKN.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder merupakan pihak yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, sehingga hubungan antaraktor dapat dipetakan sesuai besaran kedua aspek tersebut (Sulistiowati et al., 2020; Salouw, 2021). Berdasarkan keperluan manajemen dan pengambilan keputusan *stakeholder* diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder (Townesley, 1998). *Stakeholder* primer memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik karena ketergantungan untuk mata pencaharian maupun keterlibatan langsung dalam pemanfaatannya. Sebaliknya, *stakeholder* sekunder memiliki kepentingan tidak langsung, misalnya pihak yang berada dalam lembaga pengelola sumber daya atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang memanfaatkan sumber daya tersebut (Townesley, 1998).

Pemahaman mengenai peran dan klasifikasi *stakeholder* menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Dalam konteks Hutan Mangrove Mentawir, keterlibatan *stakeholder* primer seperti masyarakat lokal, kelompok sadar wisata, serta *stakeholder* sekunder seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Sinergi antar aktor ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keterpaduan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penerapan teori pembangunan berkelanjutan dalam ranah ekowisata berbasis masyarakat di Mentawir tidak hanya berfokus pada konservasi ekosistem mangrove, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan partisipasi inklusif sebagai prasyarat tercapainya kesejahteraan jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Telfer, 2012; Barrier, 2017). Konsep ini menekankan keterpaduan tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*) (Purvis et al. 2019). Dalam ranah ekowisata berbasis masyarakat, teori pembangunan berkelanjutan dipraktikkan melalui pengelolaan pariwisata yang mengedepankan konservasi sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan kohesi sosial (Honey, 1999). Pendekatan ini menggeser paradigma pariwisata massal menuju pariwisata yang lebih ramah lingkungan, berorientasi pada kualitas, dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata (Mtapuri & Giampiccoli, 2019). Teori pembangunan berkelanjutan dalam ekowisata Mentawir tidak hanya berorientasi pada pelestarian alam, tetapi juga pada penciptaan sistem tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara seimbang (Paryadi et al., 2023).

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada dasarnya memiliki 17 tujuan yang akan dicapai pada tahun 2030. Adapun salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni tujuan SDGs ke-16 untuk mengurangi tindakan kejahatan dan konflik melalui penegakan keadilan sekaligus penguatan kelembagaan. Tujuan SDGs ke-16 juga berkaitan erat dengan perwujudan keadilan dan perdamaian yang melibatkan proses partisipatif dalam pengambilan keputusan (Suganya, 2022). Kelembagaan memegang peranan penting dalam konteks tata kelola global pada implementasi tujuan SDGs ke-16 (Küfeoğlu, 2022). Bahkan, pemerintah pada suatu negara perlu melibatkan lembaga publik maupun swasta supaya dapat mencapai indikator keberhasilan SDGs (Babalola, 2022).

Kelembagaan yang kuat menjadi elemen krusial untuk mewujudkan tujuan SDGs karena memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem hukum, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan penegakan hukum yang adil dan merata (Pratama, 2024). Tujuan SDGs ke-16 yang menekankan praktik kelembagaan memiliki relevansi dengan pengelolaan

ekowisata berbasis masyarakat lokal. Ekowisata yang dikelola oleh kelembagaan masyarakat mencakup serangkaian proses mulai dari identifikasi masalah, perencanaan program, implementasi program, dan evaluasi (Taufik, 2022). Kolaborasi antar lembaga juga dibutuhkan sebagai syarat penting dalam akselerasi pencapaian target SDGs. Adapun tata kelola kelembagaan perlu dilaksanakan secara bottom-up karena lebih sesuai untuk diterapkan dalam pembangunan ekowisata (Muqsyith et al., 2023).

Ekowisata berbasis komunitas (*community-based ecotourism/CBET*) di kawasan pesisir, khususnya ekosistem mangrove, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian Prihadi et al. (2024) di kawasan Mangrove Karangsong, Indramayu, mengintegrasikan penilaian indeks CBT dengan aspek biofisik dan kapasitas tampung wisatawan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis komunitas dapat berjalan efektif ketika didukung oleh pengaturan kapasitas kunjungan yang jelas dan penguatan kelembagaan lokal. Temuan serupa diperoleh Damastuti et al. (2022) di empat desa pesisir Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa *community-based mangrove management* (CBMM) efektif bagi konservasi keanekaragaman hayati, asalkan partisipasi warga tinggi, aturan lokal jelas, dan terdapat insentif ekonomi yang memadai.

Dari sisi tata kelola, Sills et al. (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan mangrove di Indonesia sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan prioritas pembangunan. Kondisi ini sejalan dengan ulasan USFS (2024) tentang ekowisata mangrove di Asia Tenggara yang menekankan bahwa meskipun CBET dapat meningkatkan pendapatan dan kesadaran lingkungan, praktik ini rentan terhadap konflik bagi hasil, tekanan pengunjung, dan dampak sosial-budaya apabila tata kelola partisipatif tidak dijalankan dengan baik. Kasus Tangkahan di Sumatra Utara yang dikaji Wiratno et al. (2022) memperlihatkan bahwa keberhasilan CBET sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembagian manfaat yang adil, yang pada gilirannya memperkuat peran kelembagaan lokal dalam menjaga kawasan.

3. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang merupakan lokasi ekowisata berupa ekosistem mangrove yang strategis di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun tahapan penelitian ini meliputi pra lapangan, lapangan, dan pasca lapangan. Pra lapangan terdiri dari studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, serta koordinasi dengan pihak desa dan lembaga terkait untuk memperoleh izin penelitian. Lapangan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Desa Mentawir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder primer (Pokdarwis Tiram Tambun) dan stakeholder sekunder (Pemerintah Kelurahan Mentawir, PT Inhutani, dan Dinas Pariwisata Kabupaten PPU).

Pengumpulan data terdiri dari dua jenis yakni primer dan sekunder dimana data primer data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Desa Mentawir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi pemerintah desa, dokumen perencanaan pengelolaan ekowisata, publikasi ilmiah, dan data statistik terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deduktif yaitu berangkat dari kerangka teori yang telah ada untuk mengarahkan pengumpulan dan analisis data (Creswell 2016). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema penelitian untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan ekowisata di Desa Mentawir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Stakeholder Ekowisata Mangrove Mentawir

Stakeholder berperan penting dalam pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Mentawir

dengan kontribusi yang berbeda dari masing-masing pihak. Pokdarwis Tiram Tambun sebagai *stakeholder* primer menjadi motor penggerak utama sejak awal terbentuknya destinasi ini. Pokdarwis menginisiasi pembangunan jembatan titian sebagai ikon wisata, mengembangkan paket wisata susur sungai, dan memanfaatkan hasil mangrove menjadi produk kreatif seperti sirup, kopi, dan dodol mangrove. Melalui partisipasi 70 anggota, Pokdarwis mengelola *homestay*, warung, dan jasa wisata yang melibatkan masyarakat lokal. Namun, pandemi COVID-19 dan pembangunan IKN menyebabkan penurunan kunjungan secara drastis, membuat kegiatan Pokdarwis menurun dan beberapa fasilitas mangkrak. Kelembagaan ini juga belum mendapatkan program penguatan pasca krisis, sehingga keberlanjutan aktivitas sangat bergantung pada tokoh sentral.

Stakeholder sekunder terdiri dari Pemerintah Kelurahan Mentawir, PT Inhutani, dan Dinas Pariwisata Kabupaten PPU. Pemerintah Kelurahan Mentawir berperan dalam pendampingan dan pengawasan kegiatan ekowisata, namun secara administratif tidak memiliki kewenangan anggaran seperti desa, sehingga dukungan yang diberikan lebih bersifat koordinatif dan administratif. Kelurahan berperan sebagai penghubung antara masyarakat, PT Inhutani, dan pemerintah daerah, serta memastikan kegiatan wisata memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, PT Inhutani sebagai pemegang hak kelola kawasan lindung memiliki peran strategis dalam tahap awal pengembangan, terutama melalui pendanaan pembangunan jembatan titian dengan total bantuan lebih dari Rp60.000.000,00 yang disalurkan secara bertahap. PT Inhutani juga memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat melalui MoU, meskipun menurut pihak kelurahan, bentuk fisik dokumen MoU belum tersedia, sehingga pengelolaan bersama belum memiliki landasan administrasi yang kuat. Dukungan PT Inhutani belum berlanjut ke pendampingan jangka panjang atau integrasi pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara turut berperan melalui pelatihan pengelola dan pembuatan media promosi, namun juga mengidentifikasi kelemahan Mentawir pada aspek aksesibilitas, amenitas, dan daya tarik wisata yang kurang variatif. Dinas menilai inovasi atraksi sangat diperlukan agar destinasi tidak hanya diminati peneliti, tetapi juga wisatawan umum. Dukungan pemerintah daerah sejauh ini masih parsial, karena permasalahan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas wisata belum teratasi. Sinergi antar lembaga di Mangrove Mentawir menunjukkan bahwa inisiatif lokal menjadi pemicu utama lahirnya ekowisata, sementara dukungan formal dari lembaga lain menjadi faktor penunjang. Namun, kerjasama antar lembaga belum terlembagakan secara kuat, dukungan pemerintah masih parsial, dan peran kelurahan terbatas pada aspek administratif. Pengaruh eksternal seperti pandemi dan pembangunan IKN telah memindahkan fokus pembangunan ke sektor lain, sehingga ekowisata kurang menjadi prioritas. Untuk menghidupkan kembali kawasan ini, diperlukan integrasi perencanaan lintas lembaga, kejelasan kewenangan, pendanaan berkelanjutan, dan inovasi atraksi wisata yang dapat meningkatkan daya tarik sekaligus menjaga kelestarian mangrove.

4.1.1. Analisis *Stakeholder* Ekowisata Mangrove Mentawir

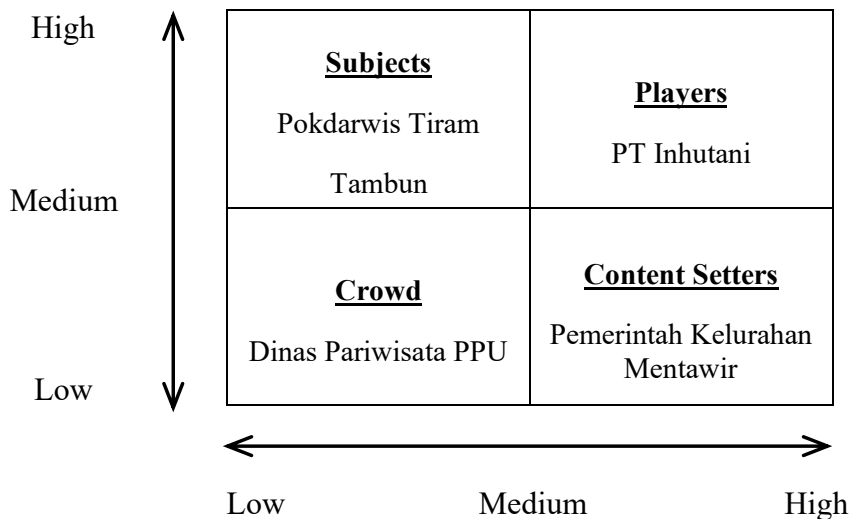
Stakeholder terdiri atas aktor-aktor utama dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung, termasuk organisasi, komunitas, kelompok sosial-ekonomi, pemerintah, dan institusi lain dari berbagai tingkatan masyarakat. Variasi kepentingan di antara mereka sering kali membuka peluang terjadinya benturan kepentingan (Masrurun & Nastiti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis *stakeholder* untuk memahami peran aktor atau kelompok yang memiliki pengaruh atau menerima dampak dari kebijakan, keputusan, maupun tindakan dalam pelaksanaan suatu program (Pangaribuan & Manandari, 2021). Proses analisis *stakeholder* diperlukan untuk mengidentifikasi peran tiap aktor atau kelompok yang mempengaruhi maupun terdampak oleh kebijakan, keputusan, atau pelaksanaan suatu program (Pangaribuan & Manandari, 2021). Terdapat empat tahapan analisis *stakeholder* yakni identifikasi, profil, susunan model, dan hubungan tiap *stakeholder* (PMBOK GUIDE, 2013). Tingkat keterlibatan dan kepentingan serta pengaruh dari masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata Kawasan Mangrove Mentawir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Profil Stakeholder Ekowisata Kawasan Mangrove Mentawir

Stakeholder	Peran dalam Kebijakan	Kepentingan	Pengaruh pada Keberhasilan
Primary Stakeholder			
Pokdarwis Tiram Tambun	Pelaku kebijakan	Inisiator, motor penggerak, pengelola <i>homestay</i> , wisata susur sungai, produk kreatif mangrove	Sangat berpengaruh
Secondary Stakeholder			
Pemerintah Kelurahan Mentawir	Pelaku kebijakan	Pendampingan, pengawasan, koordinasi antar aktor	Berpengaruh
PT Inhutani	Pelaku kebijakan	Pemegang hak kelola kawasan, pendanaan infrastruktur awal (jembatan titian)	Berpengaruh
Dinas Pariwisata Kabupaten PPU	Pembuat kebijakan	Pelatihan, promosi, evaluasi atraksi wisata	Sangat berpengaruh

Sumber Data : Hasil Olahan Penulis, 2025

Adapun analisis yang dapat digunakan yakni menggunakan teknik *power vs interest* menekankan pada identifikasi potensi kekuatan *stakeholder* dalam mempengaruhi kebijakan, sekaligus melihat kepentingan mereka terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan (Pangaribuan & Manandari, 2021). Tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) *stakeholder* terbagi menjadi empat jenis yakni *subjects*, *key player*, *crowd*, dan *contest setters* (Reed et al., 2009; Thompson, 2011). Berdasarkan kelembagaan ekowisata Kawasan Mangrove Mentawir dapat dilihat *power* dan *interest* setiap *stakeholder* yang menunjukkan pemahaman terhadap kepentingan dan wewenangnya pada Gambar 1. Matriks ini terdiri dari empat kuadran dimana kekuatan dan minat merupakan faktor yang saling mempengaruhi. Hal ini dikarenakan *power* dipahami sebagai kapasitas atau potensi aktor dalam memengaruhi arah kebijakan, pengelolaan, maupun pengambilan keputusan, sementara *interest* merujuk pada tingkat kepentingan atau keterlibatan langsung *stakeholder* terhadap keberhasilan program ekowisata.



Gambar 1. Kuadran *Power vs Interest Stakeholder* Pengelolaan Ekowisata Kawasan Mangrove Mentawir

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Pemetaan stakeholder dalam matriks di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Subjects* yakni Pokdarwis Tiram Tambun karena sebagai aktor inti dalam pengembangan ekowisata Mentawir. Sebagai motor penggerak, Pokdarwis memiliki kekuatan tinggi melalui basis keanggotaan yang solid, kapasitas mengelola atraksi (susur sungai, *homestay*, produk mangrove), dan legitimasi sosial di komunitas lokal. Tingkat kepentingannya juga tinggi, karena kelangsungan ekowisata menjadi sumber mata pencaharian sekaligus identitas sosial bagi masyarakat. Namun, ketergantungan pada tokoh sentral serta dampak pandemi COVID-19 dan pembangunan IKN menunjukkan bahwa keberlanjutan mereka masih rapuh tanpa dukungan kelembagaan eksternal yang kuat.
- 2) *Players* yakni PT Inhutani sebagai pemegang hak kelola kawasan lindung. PT Inhutani memiliki kekuatan tinggi karena legalitas dan kapasitas finansialnya. Peran strategis mereka terlihat dalam penyediaan dana pembangunan awal jembatan titian serta fasilitasi kerja sama dengan masyarakat. Tetapi, tingkat kepentingannya relatif sedang karena keterlibatan PT Inhutani lebih bersifat jangka pendek dan belum berlanjut pada pendampingan atau integrasi pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Kelemahan administrasi, seperti ketidakjelasan MoU dan memperlihatkan belum terbangunnya komitmen struktural jangka panjang.
- 3) *Crowd* yakni Dinas Pariwisata Kabupaten PPU dengan kepentingan tinggi dalam pengembangan destinasi daerah, terlihat dari program pelatihan pengelola dan penyediaan media promosi. Tetapi, kekuatan yang dimiliki tergolong menengah karena intervensi mereka terbatas pada aspek non-struktural, sementara permasalahan utama seperti infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas wisata belum tersentuh. Dengan demikian, meskipun memiliki komitmen tinggi, kapasitas eksekusi mereka masih parsial sehingga dampak dukungan terhadap penguatan ekowisata belum maksimal.
- 4) *Content Setters* yakni Pemerintah Kelurahan Mentawir sebagai penghubung administratif antara masyarakat, PT Inhutani, dan pemerintah daerah. Tingkat kekuatan relatif rendah hingga menengah, karena kewenangan terbatas (tidak memiliki anggaran desa). Kepentingannya juga menengah, lebih kepada menjaga keberlanjutan kegiatan masyarakat dan memastikan kepatuhan aturan lingkungan. Kelurahan dalam posisi ini berfungsi sebagai fasilitator koordinasi, bukan pengambil keputusan utama, sehingga kontribusinya cenderung administratif dan simbolis.

4.2. Implementasi SDGs 16 Pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir yang melibatkan peran *stakeholder* mencerminkan praktik SDGs ke-16 khususnya dalam hal tata kelola kelembagaan. *Stakeholder* yang memiliki tingkat kekuatan tinggi mampu menjadi potensi untuk memperkuat pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir. Adapun *stakeholder* yang memiliki tingkat kekuatan tinggi adalah Pokdarwis Tiram Tambun. Pengelolaan objek ekowisata oleh Pokdarwis Tiram Tambun menunjukkan bahwa terdapat peran kelembagaan pada tingkat lokal guna mengelola keberlangsungan ekowisata. Terbentuknya Pokdarwis Tiram Tambun sebagai *stakeholder* primer tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi ekowisata. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa masyarakat sebaiknya melibatkan kelompok lain seperti pemuda, perempuan, dan masyarakat marginal.

Hal tersebut supaya terjadi forum koordinasi multi-pihak secara terstruktur dan inklusif dalam praktik kelembagaan. Sementara itu, tingkat kekuatan *stakeholder* yang relatif rendah dan menengah dapat diinterpretasikan bahwa prinsip kelembagaan transparansi dan akuntabel pada pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir belum sepenuhnya dilakukan. Komitmen PT Inhutani sebagai fasilitator kerja sama dengan masyarakat perlu diperjelas dengan memberikan dokumen fisik MoU kepada pihak Pemerintah Kelurahan Mentawir dan Pokdarwis.



Gambar 2. Papan Informasi yang Memuat Pengelola Ekowisata Mangrove Mentawir
Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2024

Adanya sejumlah lembaga lokal yang aktif serta dukungan dari pemerintah daerah merupakan pondasi awal yang strategis guna mendorong penguatan kapasitas kelembagaan sesuai dengan amanat tujuan SDGs ke-16. Beberapa upaya seperti pembentukan forum komunikasi lintas pemangku kepentingan, keterlibatan warga dalam musyawarah desa, dan pelatihan pengelolaan wisata bagi kelompok masyarakat setempat dapat dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Apabila prinsip-prinsip dasar SDGs 16 yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dijadikan sebagai kerangka rujukan dalam praktik pengelolaan, maka kelembagaan lokal akan memiliki ketangguhan yang lebih besar dalam menjalankan pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir secara berkeadilan dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Pemetaan kelembagaan menunjukkan bahwa keberlanjutan Ekowisata Mangrove Mentawir melibatkan kolaborasi lintas stakeholder. Pokdarwis sebagai motor utama membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, PT Inhutani perlu memperluas peran dari penyedia dana menjadi pendamping jangka panjang, Dinas Pariwisata dituntut memperkuat aspek infrastruktur dan atraksi, sementara Kelurahan Mentawir berfungsi sebagai penghubung koordinatif. Secara keseluruhan, tata kelola ini merefleksikan prinsip SDGs 16, namun penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi inklusif melalui forum multipihak dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan ekowisata yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Mentawir memiliki implikasi strategis bagi kawasan penyangga IKN karena dapat menjadi model integrasi pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan. Kelembagaan lokal yang kuat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem mangrove. Jika didukung dengan kolaborasi lintas stakeholder, kawasan ini berpotensi menjadi pusat pembelajaran ekowisata berkelanjutan yang mendukung ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologis di sekitar IKN.

6. REFERENSI

- Aini, N., Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2021). Program strategis dalam mengatasi kendala kelembagaan pengelolaan ekowisata bahari di raja ampat (studi kasus: kampung wisata distrik meos mansar). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(2), 127-142. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655>
- Babalola, J.B. (2022). Effective Institutions and Good Governance for Sustainable Development. In *Higher Education Research and Policy Network Conference Education and Development, Ago Iwoye Nigeria*. Diakses 15 Agustus 2025, dari

- https://www.academia.edu/108217139/EFFECTIVE_INSTITUTIONS_AND_GOOD_GOVERNANCE_FOR_SUSTAINABLE_DEVELOPMENT
- Barrier, E.B. (2017). The concept of sustainable economic development. In *The economics of sustainability* (pp. 87-96). : Routledge: The Economics of Sustainability.
- Creswell, J.W. (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif. *Kuantitatif dan Campuran*, pp.27-37.
- Damastuti, E., Purnomo, H., Suroso, D.S.A., Nugroho, T.P., Suryandari, E.Y., Pribadi, R. and Fitriana, N. (2022). Effectiveness of community-based mangrove management for biodiversity conservation: a mixed-methods study in four coastal villages in Central Java, Indonesia. *Trees, Forests and People*, 10, p.100331. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100331>
- Daryono, B.S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D.W., Djohan, T.S., Hadisusanto, S., Aipassa, M.I. and Setyawati, T. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. UGM Press.
- Honey, M. (1999). Ecotourism and sustainable development. Who owns paradise? Island Press: Washington, DC.
- Kristiningrum, R., Lahjie, A.M., YUSUF, S., RUSLIM, Y. and Ma'ruf, A.M.I.R. (2020). Fauna diversity, production potential and total economic value of mangrove ecosystems in Mentawir Village, East Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 21(5). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210522>
- Küfeoğlu, S. (2022). SDG-16: Peace, justice and strong institutions. In *Emerging technologies: value creation for sustainable development* (pp. 487-496). Cham: Springer International Publishing.
- Masrurun, Z.Z. and Nastiti, D.M. (2023). Analisis stakeholders dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17(1), pp.99-118. Diakses 14 Agustus 2025, dari <http://ejournal.kemenparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/332>
- Mtapuri, O. and Giampiccoli, A. (2019). Tourism, community-based tourism and ecotourism: a definitional problematic. *South African Geographical Journal= Suid-Afrikaanse Geografiese Tydskrif*, 101(1), pp.22-35. Diakses 14 Agustus 2025, dari <https://hdl.handle.net/10520/EJC-13ae94668e>
- Muqsith, I.A., Mardiana, R. and Dharmawan, A.H. (2023). Pencapaian SDGs pada kawasan ekowisata (studi kasus: Situ gunung kabupaten sukabumi). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), pp.740-754. Diakses 15 Agustus 2025, dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/47933>
- Pangaribuan, M.T. and Munandar, A.I. (2021). Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i2.1630>
- Paryadi, R., Ulpah, M., Maryatini, M., Farida, I., Hanafiyah, M., Damhudi, D., Kusnady, T.H., Basrowi, B. and Nuryanto, U.W. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Ekowisata Mangrove Di Desa Lontar Kabupaten Serang. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), pp.312-319. <https://doi.org/10.53363/bw.v3i2.184>
- PMBOK GUIDE. (2013). *A guide to the project management body of knowledge*. 5th edn. Newtown Square, PA: Project Management Institute. In *Project Management Institute* (Vol. 5).
- Pratama, N. (2024). Achieving Peace, Justice And Strong Institutions Through Sustainable Development Goals (SDGs). In *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* (Vol. 4, pp. 00034-00034). Diakses 15 Agustus 2025, dari <https://proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/1120>
- Prihadi, D.J., Setyobudiandi, I., Haryono, E., Arifin, A.Z., Pratama, R.I., Prasetyo, D.A., Ramdhan, M., Nurdiansyah, D., Agung, M.U. and Prasetyo, R. (2024). Integrating the community-based tourism index with bio-physical and carrying capacity assessments in

- mangrove ecotourism development: The case of Karangsong, Indramayu, Indonesia. *Sustainability*, 16(11), p.4730. <https://doi.org/10.3390/su16114730>
- Purvis, B., Mao, Y. and Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability science*, 14(3), pp.681-695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Puspitasari, A., Witarti, D.I. and Fithriana, A. (2020). Penanaman Nasionalisme Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Kepada Anak: Perwujudan Konkret Pencapaian SDGs 16: Program Pengabdian Kepada Masyarakat. *Sebatik*, 24(1), pp.68-74. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i1.941>
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H. and Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), pp.1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Salouw, E. (2021). IMPLEMENTASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (Studi Kasus pada Kepulauan Banda). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 06(1), 1–10.
- Sills, E., Duchelle, A.E., Pambudhi, F., Atmadja, S.S., Nurfatriani, F., Resosudarmo, I.A.P., Komalasari, M., Kweka, D. and Seneviratne, T. (2021). Mangrove governance in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 210, p.105688. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105688>
- Suganya, M. (2022). Peace, justice, and strong institutions—An overview. *NeuroQuantology*, 20(16), pp.4665-4668. DOI: 10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880475
- Suharyono, S., Aipassa, M.I., Bulan, D.E., Karyati, K., Rayadin, Y., Siahaya, M.E., Ruslim, Y. and Kristiningrum, R. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pt Inhutani I Unit Batu Ampar-Mentawir Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*, 22(2), pp.283-296. <https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i2.6774>
- Sulistiowati, R., Meiliyana, M., Meilinda, S. and Ma'arif, S. (2020). Stakeholder partnership in the management of marine tourism in south lampung regency, lampung. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 2020, 1(2), pp.82-91. Diakses 14 Agustus 2025, dari <https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL/article/viewFile/105/66>
- Taufik, M.N.B. and Tsurayya, T. (2022). Strategi Komunikasi Pemberdayaan Desa Wisata Kemiren Dalam Upaya Mendukung Sustainable Development Goals. *The Commercium*, 6(1), pp.21-34. <https://doi.org/10.26740/tc.v6i1.49269>
- Telfer, D. (2012). The Brundtland Report (Our Common Future) and tourism. In *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment* (pp. 213-226). : Routledge: The Routledge Handbook of Tourism and the Environment
- Thompson, R. (2011). Stakeholder analysis: Winning support for your projects. *MindTools*. *Recuperado de*: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm.
- Townsley, P. (1998). *Social Issues in Fisheries*. Rome: FAO Fisheries Technical Paper.
- United States Forest Service (USFS). (2024). Mangrove ecotourism and conservation in Southeast Asia: Opportunities and challenges. *USFS Technical Report*.
- Wiratno, W., Hermawan, A., Sunarminto, T., Marwoto, M. and Achmad, M.S. (2022). Community-based ecotourism for forest conservation and local livelihoods: The case of Tangkahan, North Sumatra, Indonesia. *Sustainability*, 14(14), p.8481. <https://doi.org/10.3390/su14148481>